

Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Sektor Peternakan Provinsi Sumatera Utara Menggunakan Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Impact of Fiscal Decentralization on The Development of The Livestock Sektor in North Sumatera Province Approach to The Social Accounting Matrix

Muhammad Syafril Harahap¹, Hermanto Siregar⁴, Erlina² dan Rahmanta³

¹Sekolah Tinggi Tinggi Ilmu Ekonomi LMII, Medan

²Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara

³Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara

⁴Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB

syafril.harahap66@gmail.com

Diterima : 06 Agustus 2019

Disetujui : 28 Agustus 2019

Diterbitkan : 31 Agustus 2019

Abstrak: Pembangunan Sektor peternakan di Sumatera Utara tidak terlepas dari peran pemerintah daerah mulai dari perencanaan dan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Belanja Daerah (APBD). Untuk itu perlu diketahui dampak dari pengeluaran pemerintah daerah dalam pembangunan peternakan di Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014, di Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (Social Accounting Matriks) dan sekaligus dilakukan simulasi pengeluaran anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada sektor peternakan, dengan menggunakan data pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dampak injeksi Rp. 1 milyar pengeluaran pemerintah pada sektor peternakan akan meningkatkan output pada sektor peternakan Rp 2,8954 milyar, pendapatan rumah tangga sebesar Rp 0,3403 milyar, pendapatan faktor produksi modal Rp 0,3608 milyar dan tenaga kerja pertanian Rp 0,2154 milyar. Jumlah pendapatan sektor pertanian (termasuk peternakan) pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 22.563.848 /jiwa, dengan jumlah pekerja sebesar 2.556.044 jiwa atau 43% dari total tenaga kerja.

Kata Kunci: desentralisasi fiskal, peternakan, neraca sosial ekonomi

Abstract: The Development of the Livestock Sector in North Sumatera is inseparable from the role of the regional government starting from planning and financing originating from the Regional Budget (APBD). For this reason, it is necessary to think about the regional government in developing livestock in North Sumatra. This research was conducted in 2014, in North Sumatera Province, using the Social Accounting Matrix and simultaneously simulating the North Sumatera Provincial Government's budget for the livestock sektor, using North Sumatera Provincial Government expenditure data in 2014, and other data related to research. Impact of injection Rp. 1 billion government spending on the livestock sector will increase output in the livestock sector by Rp. 2,8954 billion, household income of Rp. 3,403 billion, factor in capital production income of Rp. 3,608 billion and agricultural labor Rp. 0,2154 billion. The total income of the agricultural sector (including livestock) in 2014 in North Sumatera Province was Rp. 22.563.858 / employe, with the number of workers amounting to 2.556.044 people or 43% of the total employment. To ensure the creation of a solid economic fundamentals in order to achieve an increase in community income and excessive economic growth, in the future, the future development strategy should be pursued in the development of the strength of domestic resources and many workers.

Keywords: fiscal decentralization, livestock, social accounting matrix

1. Pendahuluan

Tujuan pembangunan peternakan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) adalah mewujudkan swasembada pangan asal ternak yang berkelanjutan

dan berdaya saing menuju masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera serta menyediakan pangan asal ternak yang cukup, baik kuantitas dan kualitas yang berdaya saing serta meningkatnya populasi

ternak dan produksi serta daya saing. Berdasarkan letak geografis, Sumut juga berpeluang besar dalam sektor peternakan. Untuk itu, diharapkan pengembangan inovasi produksi peternakan di Sumut dapat ditingkatkan.

Pemerintah provinsi Sumatera Utara memiliki lahan yang sangat luas untuk dapat melakukan pengembangan peternakan. Terdapatnya dua puluh lima kabupaten, delapan kota dan banyak pulau-pulau yang terdapat di kawasan Sumatera Utara merupakan bukti bahwa banyak lahan yang dapat dijadikan sentra pengembangan peternakan. Hal tersebut akan berhasil apabila dilakukan melalui perencanaan pengembangan wilayah peternakan sesuai dengan keunggulan komoditas. Dengan potensi sumber daya alam yang tersedia, berupa padang penggembalaan dan lahan perkebunan, baik PTPN ataupun perkebunan swasta di Sumut seluas lebih kurang 1,2 juta hektar, penyediaan ternak sapi lokal masih sangat berpeluang untuk dikembangkan. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, populasi sapi potong di Sumut saat ini sebanyak 712.106 ekor, sapi perah 1.948 ekor dan kerbau 108.792 ekor. Sementara itu, kebutuhan daging sapi/kerbau per tahun 24.539 ton. Kebutuhan ini dipenuhi dari produksi lokal sebanyak 19.100 ton, sedangkan sisanya masih dipenuhi dari impor sebanyak 5.439-ton setara dengan 29.232 ekor per tahun.

Kebutuhan akan daging tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesadaran akan pemenuhan nutrisi yang bersumber dari ternak. Meningkatnya pendapatan masyarakat seiring dengan tumbuhnya ekonomi Sumatera Utara periode 2010 sampai dengan 2013 mencapai kisaran 6%. Pada tahun 2010 kontribusi sektor peternakan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,89%, dan menurun menjadi 1,84 pada tahun 2014

Upaya peningkatan produksi peternakan di Provinsi Sumatera Utara terus dilakukan, pembangunan peternakan juga tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah, daerah, sesuai dengan Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 [1], dibagi menjadi tiga, yaitu: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi, secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Dalam rangka pengembangan dan pembangunan peternak di Sumatera Utara pemerintah Provinsi Sumatera Utara setiap tahun

mengeluarkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada sektor peternakan. tahun 2008 sebesar Rp. 23.364.959.550 dan meningkat menjadi Rp. 35.778.115.487 pada tahun 2014 [2].

Untuk melihat dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara pada sektor peternakan, maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap pengembangan peternakan di Provinsi Sumatera utara dengan menggunakan pendekatan Sistem Neraca Sosial ekonomi (*Sosial Accounting Matriks*) dengan tabel SNSE klasifikasi 83 x 83 sektor dan kemudian diagregasi menjadi klasifikasi matriks ukuran 13 x 13.

2. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data sekunder BPS Provinsi Sumatera Utara, selain itu juga berasal dari Dinas/Instansi terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Sumatera Utara, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan lainnya. Beberapa data tersebut diantaranya adalah:

- 1) Survey khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR).
- 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara.
- 3) Data pengeluaran dan struktur pengeluaran dari survey social ekonomi nasional.
- 4) Survei Khusus Input Output.
- 5) Tabel Input Output Sumatera Utara 2003 dan Tabel Input Indonesia SNSE Indonesia 2008.
- 6) Sumatera Utara dalam Angka
- 7) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Sumatera Utara.
- 8) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara.
- 9) Statistik Keuangan Provinsi Sumatera Utara.
- 10) Data lainnya yang terkait dengan penyusunan SNSE Sumatera Utara.
- 11) Laporan Rencana Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.
- 12) Data PDRB dan belanja daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara.

Data Lainnya yang berkaitan dengan tulisan ini, daerah di Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 terbagi menjadi 44 OPD, yang selanjutnya diagregasi menjadi sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Sektor pemerintahan dan pertahanan, pendidikan, kesehatan, film dan jasa sosial lainnya di Pemerintah Sumatera Utara Tahun 2014.

N o	URUSAN PEMERINTAHAN	SEKTOR
1	Dinas Pendidikan	Pemerintahan, Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial Lainnya
2	Dinas Kesehatan	
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	
4	Rumah Sakit Haji	
5	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
7	Badan Lingkungan Hidup	
8	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
11	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
12	Bakesbangpol dan Linmas	
13	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
15	DPRD	
16	KDH & WKDH	
17	Sekretariat Daerah	
18	Sekretariat DPRD	
19	Badan Penelitian dan Pengembangan	
20	Inspektorat Provinsi	
21	Kantor Perwakilan Jakarta	
22	Dinas Pendapatan	
23	Badan Pendidikan dan Pelatihan	
24	Badan Kepegawaian Daerah	
25	Sekretariat KORPRI	
26	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	
27	Bapemmas dan Pemdes	
28	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB dan pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2014. Pembagian sektor sesuai dengan PDRB terhadap belanja pemerintah, Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan menggolongkan belanja OPD Provinsi Sumatera Utara yang berhubungan dengan sektor pada PDRB, yang dapat dijelaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat. Selanjutnya data tersebut digunakan untuk pemisahan anggaran belanja di Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Sumatera Utara, menjadi 11 (sebelas) sektor yakni Sektor Pertanian Tanaman Pangan (9), Peternakan dan Hasil-Hasilnya (10), Kehutanan dan Perburuan (11), Perikanan (12), Pertambangan dan Penggalian Lainnya (14), Listrik, Gas dan Air Minum (20), Perdagangan (23), Angkutan Darat (25), Angkutan, Air dan Komunikasi (26), Jasa Penunjang Angkutan dan Pergudangan (27) serta Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial (30). Selanjutnya berdasarkan data tersebut disusun tabel SNSE Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dengan klasifikasi matrik 83 x 83 sektor. Kemudian dalam pembahasan diagregasi menjadi 13 x 13 sektor.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pendapatan Tenaga Kerja dan Jumlah Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.

Tabel 2 Pendapatan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

No	Sektor Produksi	Pendapatan (Milyar)	% Pendapatan Sektor	Pendapatan per TK/Rp	Jumlah TK (jiwa)	% TK
1	Pertanian	57,674.19	22.93	22,563,848	2,556,044	43,46
2	Pertambangan	9,433.97	3.75	258,720,107	36,464	0,62
3	Industri Pengolahan	50,732.63	20.17	121,321,747	418,166	7,11
4	Listrik, Gas	1,428.67	0.56	71,244,216	19,997	0,34
5	Bangunan	15,912.79	6.32	40,932,379	388,758	6,61
6	Perdagangan	55,843.82	22.20	50,132,162	1,113,932	18,94
7	Pengangkutan	19,276.00	7.66	71,249,543	270,543	4,60
8	Bank	7,373.38	2.93	57,773,337	127,626	2,17
9	Jasa Kemasyarakatan	33,816.50	13.44	35,579,125	950,429	16,16
	Jumlah	251,482.96	100,00		5,881,959	100,00

Pada sektor pertanian, upah tenaga kerja yang diterima sebesar Rp. 57,674.19 milyar, atau 22,93% pendapatan upah, kemudian upah tenaga kerja sektor

perdagangan Rp. 55,543.82 milyar atau 22,51%, upah tenaga kerja industri pengolahan sebesar Rp. 50,732.63 milyar, atau 20,17%. Sedangkan yang paling

kecil adalah upah tenaga kerja pada sektor listrik dan gas yakni Rp. 1,428.67 milyar atau 0,57%.

Pada sektor pertanian, sub sektor pertanian tanaman pangan memberikan kontribusi sebesar Rp. 34,347.21 milyar atau 59,55%, sektor peternakan sebesar Rp. 9,686.52 milyar atau 16,80%, sektor kehutanan dan perburuan memberikan sumbangan kepada penerimaan upah tenaga kerja sebesar Rp. 4,925.31 milyar dan sektor perikanan sumbangannya sebesar Rp. 8,715.15 milyar.

Jika dibandingkan upah tenaga kerja pertanian dengan jumlah persentase tenaga kerja, maka upah tenaga kerja pertanian cenderung lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Hal ini sektor pertanian merupakan pilihan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, karena di Provinsi Sumatera Utara tenaga kerja yang berpendidikan SLTA ke bawah mencapai 35,48%. Selanjutnya angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SD ke bawah dan SLTP, masing-masing 33,05% dan 22,20%. Dengan

Demikian bila terjadi peningkatan output pada sektor pertanian akan memberikan dampak yang sangat luas untuk kesempatan kerja bagi masyarakat khususnya bagi yang berpendidikan SLTA ke bawah.

Adanya injeksi belanja daerah sebesar Rp. 1 milyar pada sektor peternakan, seperti terlihat pada Tabel 3, perubahan pendapatan tenaga kerja pertanian sebesar Rp. 0.2080 milyar, lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan tenaga kerja produksi, tata usaha dan kepemimpinan. Injeksi Rp. 1 milyar belanja daerah kepada sektor peternakan dan hasil-hasilnya, maka dampak pertama akan bekerja pada sektor neraca bersangkutan yakni sektor peternakan, yang ditunjukkan dengan symbol Ma₁, Rp. 1.8527 milyar, selanjutnya menyeberang ke kelompok neraca produksi (Ma₂) yang mempunyai dampak terbesar adalah pada sektor peternakan sendiri Rp. 1.0427 milyar, sektor pertanian Rp. 0.1704 milyar, sektor kehutanan 0.0042 milyar dan sektor perikanan sebesar Rp. 0.0470 milyar.

Tabel 3. Dampak injeksi pada sektor peternakan dan hasil-hasilnya.

Jenis Neraca	Kode	I	Ma ₁	Ma ₂	Ma ₃	Ma
Tenaga Kerja						
1. Pertanian	1			0.2080		0.2080
2. Produksi	2			0.0490		0.0490
3. Tata Usaha	3			0.0404		0.0404
4. Kepemimpinan	4			0.0223		0.0223
Modal	5			0.0368		0.0368
Rumah Tangga	6			0.3403		0.3403
Perusahaan	7			0.0332		0.3320
Pemerintah	8			0.0237		0.0237
Pertanian	9		0.1098		0.1704	0.2802
Peternakan	10	1	1.8527		1.0427	2.8954
Kehutanan	11		0.0010		0.0042	0.0430
Perikanan	12		0.0112		0.0470	0.4812

Dampak selanjutnya menjalar ke neraca faktor produksi dan institusi, terlihat bahwa ternyata dampak pengganda terbesar pada faktor produksi ini terjadi pada sektor pendapatan rumah tangga yakni sebesar Rp. 0.3403 milyar, sedangkan tenaga kerja pertanian hanya mendapatkan sebesar Rp. 0.2154 milyar. Setelah memberikan dampak kepada kelompok faktor produksi dan institusi, pengaruh selanjutnya akan mempengaruhi neraca lainnya dan kembali ke neraca semula yang ditunjukkan dengan symbol Ma₃. Seperti terlihat pada tabel penerima terbesar dampak pengganda multiplier (ma₃) tersebut adalah sektor peternakan yakni sebesar Rp. 1.0427 milyar.

Akhirnya dengan adanya suntikan sebesar Rp. 1 milyar pada sektor peternakan, ternyata akan meningkatkan output sektor peternakan itu sendiri (Ma) sebesar Rp. 2.8954 milyar, meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 0.3403 milyar, menambah pendapatan faktor produksi modal sebesar Rp. 0.3608 milyar, dan tenaga kerja pertanian Rp. 0.2154 milyar.

3.2. Simulasi Kenaikan Belanja Langsung 5% Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Peternakan Tahun 2014.

Pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera utara yang terdiri dari 27 kabupaten dan 7 Kota, belanja langsung untuk sektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar Rp. 121,430,017,099.74. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terbesar membelanjakan anggaran belanja langsungnya terhadap sektor ini yakni sebesar Rp. 16,541,508,852.40, sedangkan pemerintahan kabupaten/kota yang paling besar adalah Pemerintahan Kota Medan dengan belanja sebesar Rp. 16,287,327,615.50, kemudian Kabupaten Deli Serdang Rp. 9,508,692,906.55, dan yang paling kecil pengeluarannya di sektor ini adalah Kabupaten Nias Barat yakni sebesar Rp. 1,749,343,775.33. Jika belanja langsung ini dinaikkan sebesar 5% atau Rp.

6,071,500,854.99, maka akan membawa dampak menstimulus output sebesar Rp. 75.05 milyar.

Tabel 4. Simulasi kenaikan belanja langsung 5% pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 pada sektor Peternakan dan hasil-hasilnya terhadap neraca regional tahun 2014 (Rp/milyar)

No	Sektor	Nilai Dasar 2014	Perubahan 5%	%
1	Faktor Produksi	494,282.28	12.609	0.017
2	Institusi	665,900.45	14.809	0.005
3	Sektor Produksi	2,110,376.20	47.628	0.075

Berdasarkan Tabel 4, peningkatan pengeluaran Belanja Langsung 5% pada sektor peternakan dan hasil-hasilnya akan mengakibatkan total nilai tambah pada sektor faktor produksi sebesar Rp. 12.609 milyar kemudian pada neraca institusi sebesar Rp. 14.809 milyar, dan pada neraca sektor produksi akan menambah input sebesar Rp. 47,628 milyar.

Pada neraca faktor produksi modal merupakan yang terbesar penambahan inputnya yakni sebesar Rp. 3,93 milyar, kemudian tenaga kerja pertanian yakni sebesar 3,52 milyar, sektor tenaga kerja tata usaha, penjualan dan jasa-jasa sebesar Rp. 2,49 milyar dan yang paling kecil adalah sektor tenaga kerja kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, professional dan teknisi sebesar Rp. 0,91 milyar.

Pada sektor institusi peningkatan yang paling besar adalah pada pendapatan rumah tangga yakni sebesar Rp. 10,49 milyar, kemudian perusahaan sebesar Rp. 10,49 milyar dan penerimaan pemerintah meningkat sebesar Rp. 2,90 milyar.

Sedangkan pada sektor produksi penambahan belanja langsung sebesar 5% akan membawa dampak terjadinya peningkatan penerimaan yang paling besar adalah pada sektor peternakan dan hasil-hasilnya yakni sebesar Rp. 12,02 milyar, kemudian pada sektor perdagangan sebesar Rp. 6,50 milyar, sektor industry makanan, minuman dan tembakau sebesar Rp. 6,42 milyar, sektor pertanian tanaman pangan sebesar Rp. 3,72 milyar dan yang paling kecil adalah pertambangan dan penggalian lainnya yakni sebesar 0,05 milyar.

3.3. Simulasi Peningkatan Total Belanja Tidak Langsung Sektor Peternakan dan Hasil-Hasilnya Sebesar 5%

Pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Utara (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota) belanja tidak langsung untuk sektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar Rp. 32,467,429,297. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belanja tidak langsungnya pada sektor ini adalah sebesar Rp. 7,876,379,842.60, sedangkan pemerintahan kabupaten/Kota yang paling besar adalah Pemerintahan Kota Medan dengan belanja

sebesar Rp. 2,849,019,472.00, Kabupaten Deli Serdang Rp. 2,056,152,334.82, dan yang paling kecil pengeluarannya di sektor ini adalah Kabupaten Nias yakni sebesar Rp. 280,922,285.04. Jika belanja tidak langsung ini dinaikkan sebesar 5% atau Rp. 1,623,371,464.86, maka akan membawa dampak peningkatan output sebesar Rp. 20,06 milyar.

Tabel 5. Simulasi kenaikan belanja tidak langsung 5% pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 pada sektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap neraca regional Tahun 2014 (Rp/milyar)

No	Sektor	Nilai Dasar 2014	Perubahan 5%	%
1.	Faktor Produksi	494,282.28	3.376	0.004
2.	Institusi	665,900.45	3.959	0.002
3.	Sektor Produksi	2,110,376.20	12.732	0.020

Seperti terlihat pada Tabel 5 di atas, jika penambahan belanja tidak langsung sebesar 5% maka pendapatan faktor produksi akan meningkat sebesar Rp. 3,3769 milyar, sektor institusi meningkat sebesar Rp. 3,9591 milyar dan input sektor faktor produksi akan bertambah sebesar Rp. 12,7329 milyar.

Pada sektor faktor produksi pendapatan modal merupakan yang tertinggi peningkatannya yakni sebesar Rp. 1,05 milyar, kemudian peningkatan input terhadap tenaga kerja pertanian sebesar Rp. 0,94 milyar, dan tenaga kerja tata usaha, penjualan dan jasa-jasa sebesar Rp. 0,67 milyar dan yang paling kecil peningkatannya adalah pada tenaga kerja Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Professional dan teknisi yakni sebesar Rp. 0,24 milyar.

Jika penambahan biaya tidak langsung 5% pada pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara, akan membawa dampak peningkatan pendapatan pada sektor institusi. Peningkatan yang paling tinggi adalah pendapatan rumah tangga yakni sebesar Rp. 2,81 milyar, pendapatan perusahaan akan meningkat sebesar Rp. 0,78 milyar dan penerimaan pemerintah juga akan bertambah sebesar Rp. 0,38 milyar.

Sedangkan pada sektor produksi penambahan belanja tidak langsung sebesar 5% akan membawa dampak terjadinya peningkatan penerimaan yang paling besar adalah pada sektor peternakan dan hasil-hasilnya yakni sebesar Rp. 3,21 milyar, kemudian pada sektor perdagangan sebesar Rp. 1,74 milyar, sektor industry makanan, minuman dan tembakau sebesar Rp. 1,72 milyar, sektor pertanian tanaman pangan sebesar Rp. 0,99 milyar dan yang paling kecil adalah pertambangan dan penggalian lainnya yakni sebesar 0,01 milyar.

3.4. Perbandingan Perubahan Pendapatan akibat Simulasi 5% Pada sektor Rumah Tangga, Pertanian Pangan, Peternakan, Kehutanan dan perikanan Serta Sektor Pemerintahan

Terlihat perbandingan peningkatan output pada sektor rumah tangga, pertanian pangan, peternakan, kehutanan, perikanan dan sektor pemerintahan, bila belanja langsung dan belanja tidak langsung serta total belanja sektor Peternakan dan hasil-hasilnya jika dinaikkan sebanyak 5%, maka akan membawa perubahan pada kelima sektor tersebut sebesar masing-masing untuk belanja langsung Rp. 29,33 milyar, belanja tidak langsung Rp.7,84 milyar dan yang paling tinggi adalah total pengeluaran sebesar Rp. 37,18 milyar.

Tabel 6. Perbandingan dampak perubahan pendapatan pada sektor produksi dan institusi belanja langsung, belanja tidak langsung, dan total belanja pada sektor peternakan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2014

No	Sektor	Perubahan 5%		
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Total Belanja
1	Rumah Tangga	10,49	2,81	13,30
2	Pertanian Pangan	3,72	0,99	4,71
3	Peternakan	12,02	3,21	15,24
4	Kehutanan	0,09	0,02	0,11
5	Perikanan	0,89	0,24	1,13
6	Pemerintahan	2,12	0,57	2,69
J U M L A H		29,33	7,84	37,18

4. Kesimpulan

Pengeluaran belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara pada sektor Peternakan memberikan dampak terhadap pertumbuhan sektor Peternakan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014. Berdasarkan simulasi kenaikan 5% Belanja Daerah, (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) akan meningkatkan output sektor lain.

Referensi

- [1] Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Jakarta.
- [2] Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 2014. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014. Medan.
- [3] Keefer, P. dan Stuti, K. 2003. The political economy of public expenditures. Background paper for WDR 2004

- [4] Khusaini, M, 2006, Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, Malang : BPFE Unbraw
- [5] Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- [6] Priyo, H. 2009. "Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak". Proceeding